

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengkajian berbagai dokumen dan literatur yang telah penulis peroleh, tentang kebijakan haji di masa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia penuh dengan perjuangan. Ini dikarenakan umat Islam Indonesia yang ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah, harus memenuhi berbagai peraturan dan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti diwajibkannya umat Islam yang akan pergi ke Mekkah mempunyai pas jalan haji, harus menunjukkan dan menyimpan uang sebesar 500 gulden kepada pemerintah setempat (bupati), harus menggunakan tiket pergi-pulang, harus melalui pelabuhan embarkasi haji dan setelah kembali ke Tanah Air harus melaporkan kepulangannya serta mengikuti ujian haji. Selain itu, sarana transportasi yang digunakan oleh umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji pada umumnya menggunakan kapal barang, setelah adanya kapal uap barulah mulai memakai kapal penumpang yang dioperasikan oleh kongsi tiga milik maskapai Belanda (Nederland, Rotterdamsche Lloyd dan Oceaan Maatschapij). Namun, masalah kesejahteraan calon haji tidak diperhatikan. Di atas kapal,

calon jamaah haji Indonesia harus berdesak-desakan, berjubel dan tidak sedikit yang meninggal dunia selama perjalanan pergi maupun pulang ke Tanah Air.

2. Politik haji yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia terbagi menjadi dua fase. Fase pertama (1800-1889), pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi bahkan cenderung mempersulit umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ini bisa dilihat dengan berbagai kebijakan ordonansi haji yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, para haji juga sering dicurigai, dianggap fanatik dan tukang memberontak. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial Belanda selalu mengawasi dengan ketat segala gerak-gerik para haji. Fase kedua (1889-1932), kebijakan politik haji pada masa itu lebih mengarah pada pengawasan terhadap pengaruh gerakan Pan Islamisme dan nasionalisme. Kebijakan ini tidak terlepas dari pengaruh C. Snouck Hurgronje sebagai arsitek politik Islam Hindia Belanda. Menurut Snouck, pemerintah Belanda tidak sepatutnya mencurigai umat Islam Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji. Namun, yang perlu diperhatikan justru dari kalangan umat Islam yang terlibat dalam politik dan berkeinginan untuk melakukan ibadah haji, karena mereka berpotensi menyebarkan gerakan Pan Islamisme dan paham nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi, sehingga dapat mengancam kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

3. Latar belakang pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi haji disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah umat Islam Indonesia yang pergi ke Mekkah semakin bertambah banyak, sehingga berakibat pada jumlah uang yang mengalir dari Indonesia ke negeri Arab meningkat dan dalam jumlah yang cukup besar. Ini artinya mengurangi keuntungan negara Belanda karena uang di negeri jajahannya mengalir ke tempat lain. Kedua, pemerintah Belanda ingin membatasi jumlah umat Islam Indonesia yang ingin pergi menunaikan ibadah haji karena menurut pemerintah kolonial Belanda, para haji yang kembali ke Tanah Air pasca menunaikan ibadah haji akan menanamkan benih fanatisme dan kefanatikan, sehingga dapat menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Ketiga, pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir bahwa jamaah haji Indonesia dapat bertemu dengan sesama Muslim dari seluruh dunia Islam dan tidak mustahil akan menumbuhkan kesadaran untuk melawan pemerintah Belanda. Keempat, agar dapat menekan jumlah para jamaah haji pribumi yang bermukim di Mekkah. Kelima, disebabkan ribuan jamaah haji yang kembali dari Mekkah membawa penyakit menular dan dikawatirkan akan menyebar di Tanah Air. Keenam, adanya reaksi dari umat Islam Indonesia untuk memperbaiki sarana dan fasilitas pengangkutan haji.

B. Saran

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, yang wajib hukumnya bagi yang mampu secara materi maupun fisik. Dalam penulisan skripsi terkait kebijakan haji pada masa kolonial Belanda ini, terbatas pada pembahasan pelaksanaan haji di masa kolonial Belanda, kebijakan politik haji dan ordonansi haji. Untuk itu pada bagian akhir ini, sebagai saran akan bermanfaat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan kepada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora agar lebih memperbanyak literatur sejarah, khususnya sejarah umat Islam pada masa kolonial Belanda di Indonesia.
2. Diharapkan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya untuk memperbanyak dan melengkapi berbagai literatur sejarah, terutama sejarah yang berkaitan dengan sejarah haji di Indonesia dan kebijakan politik haji di Indonesia.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam lagi penelitiannya mengenai kebijakan ordonansi haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia untuk menyempurnakan lagi hasil penelitian ini.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah rabilalamin* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, tulisan ini belum bisa dikatakan sempurna. Walaupun secara maksimal telah diupayakan kesempurnaannya, namun masih banyak kekurangan,

kelemahan, dan banyak celah yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup mata dan telinga untuk mendengar dan menerima tegur sapa atau kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan hasil penelitian ini.

Tiada seorang pun yang sukses tanpa bantuan orang lain dan tiada seorang pun sukses tanpa membutuhkan orang lain. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat demi terselesaikannya penulisan penelitian ini. Mudah-mudahan amal baik semuanya memperoleh balasan dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis mengharap dan memohon ridho-Nya, dan penulis berdo'a mudah-mudahan tulisan ini mempunyai manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.,